24 Maret 2020

Rilis Sikap Aliansi Rakyat Bergerak (ARB):

Negara Gagal Menghadapi Krisis Rakyat Menentukan Jalannya Sendiri ↘

#ReformasiDikorupsi #GagalkanOmnibusLaw

Rilis Sikap Aliansi Rakyat Bergerak, 24 Maret 2020

Negara Gagal Menghadapi Krisis, Rakyat Menentukan Jalannya Sendiri

Kondisi kapitalisme global telah mencapai titik nadirnya. Dimulai dengan perang dagang berlanjut ke perang harga minyak mentah, berdampak besar pada ambruknya ekonomi dunia. Resesi ekonomi dunia semakin diperparah dengan merebaknya pandemi COVID-19. Akibat dari keadaan tersebut, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat di level 16.486 (JISDOR 24/3) dan memicu kepanikan di pasar saham. Dampak langsung dari ambruknya ekonomi ialah turunnya daya beli rakyat kelas menengah bawah. Apalagi stok bahan pangan semakin menipis jelang Paskah dan Ramadhan. Hal ini diperparah oleh solusi pemerintah dengan membuka keran impor pangan seperti beras, gula, garam dan kebutuhan pokok lainnya.

Sebagai perbandingan, ketika pandemi COVID-19 telah memakan banyak korban, pemerintah Inggris memberikan kompensasi sebesar 80% dari total gaji pekerja, Presiden Korea Selatan beserta menterinya memotong 30% gajinya untuk penanganan COVID-19. Pemerintahan Kuba juga mengirim tenaga medis ke negara-negara terdampak COVID-19 seperti Tiongkok, Italia dan Suriname. Penanganan COVID-19 secara efektif juga dilakukan oleh pemerintah Vietnam dan Singapura dengan tingkat kematian yang sangat rendah. Bahkan Wuhan sebagai

daerah yang pertama kali terpapar COVID-19 keadaannya sudah membaik.

Sebaliknya di Indonesia, dalam kondisi darurat tersebut, Rezim Jokowi justru melakukan berbagai kebijakan yang merugikan kepentingan rakyat. Di sektor perekonomian dan ketenagakerjaan dilakukan stimulus dengan mempercepat pengesahan Omnibus Law yang mengancam kesejahteraan buruh dan kerusakan ekologi. Pemerintah terbukti gagal memainkan peran sebagai pelindung bagi seluruh pekerja, terbukti dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/3/HK.04/III/2020 di poin II.4. menempatkan proses negosiasi pengusaha dan buruh tanpa kehadiran pemerintah.

Sedangkan perihal mitigasi COVID-19, Rezim Jokowi justru menggandeng *influencers* senilai Rp 72 M hanya untuk promosi dan melakukan diskon tarif maskapai penerbangan guna mengejot kunjungan wisata. Secara teknis juga kurangnya transparansi penanganan COVID-19, kegagapan koordinasi pusat dan daerah serta buruknya infrastruktur kesehatan. Kegagapan rezim Jokowi dalam menghadapi krisis COVID-19 juga berimplikasi pada lambatnya penanganan kasus yang menempatkan rakyat luas dan tenaga medis dalam risiko tinggi. Hal ini sangat beresiko ketika melihat data per-tanggal 24 Maret 2020 yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan *mortality rate* (tingkat kematian) nomor 1 di ASEAN, dengan 55 kematian dari 686 kasus (worldometer.info,

24/3). Inkonsistensi dan keterlambatan kebijakan ini berpeluang mengakibatkan krisis pangan dan krisis alat-alat kesehatan yang akan memicu kemarahan rakyat di seluruh Indonesia

Political will dan orientasi ekonomi politik yang bias pasar ini menempatkan kepentingan kapitalisme di atas masalah kemanusiaan dan jaminan layanan dasar *(basic need)* rakyat secara menyeluruh. Alih-alih memberikan prioritas kepada kebutuhan mendasar, jaringan keamanan sosial dan merespon pandemi Covid-19, Rezim Jokowi justru melakukan pemborosan alokasi APBN 2020 di sektor Pertahanan dan Kementerian PUPR dengan total anggaran sebesar Rp 251,4 Triliun, tentunya tidak proporsional dengan perbandingan anggaran untuk Kementerian Kesehatan, Kemenristek, dan Kemendikbud yang hanya dianggarkan sebesar Rp 135,9 Triliun. Alokasi anggaran yang timpang ini berimplikasi pada rendahnya kualitas riset, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang memarjinalkan kesejahteraan rakyat miskin. Hal ini semakin diperparah dengan struktur birokrasi yang gemuk dan tidak efisien anggaran seperti stafsus milenial, Kantor Staf Presiden, Wakil Menteri, dan pembentukan lembaga-lembaga pembantu presiden lainnya. Dalam lanskap yang lebih luas republik ini pada realitasnya hanya dikuasai oleh segelintir oligarki, data dari Lowy Institute (2020) menyebutkan bahwa aset 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan total pendapatan 40% orang termiskin atau 100 juta orang.

Rilis Sikap Aliansi Rakyat Bergerak, 24 Maret 2020

Selaras dengan Laporan Akhir Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2014-2019 menyebutkan bahwa 1% orang di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Kesenjangan ekonomi dan akses sumber daya ini barang tentu berimplikasi terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk dalam kondisi *emergency* – darurat bencana.

Oleh karena itu, sebagai gerakan sipil, Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menuntut pemerintah melakukan seluruh tuntutan yang dirumuskan dalam 31 petisi, yaitu;

1. Pecat segera Menteri Kesehatan Terawan Agus, karena telah gagal mengantisipasi pandemi COVID-19;
2. Test COVID-19 gratis untuk seluruh rakyat Indonesia;
3. Bangun infrastruktur dan fasilitas layanan kesehatan yang memadai, berkualitas dan adil bagi pasien dan tenaga medis;
4. Gratiskan biaya iuran BPJS kesehatan untuk semua warga;
5. Tingkatkan produksi masker, obat-obatan dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dalam negeri;
6. Alihkan produksi pabrik tekstil dan pakaian jadi ke produksi masker untuk kepentingan pemenuhan masker dan APD;
7. Bangun posko terpadu darurat COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia hingga level kecamatan;

8. Libatkan mahasiswa kluster medika sebagai tim medis penanganan COVID-19;
9. Membuka partisipasi rakyat secara kolektif untuk terlibat dalam pencegahan dan penanganan COVID-19;
10. Fungsikan semua laboratorium kesehatan di seluruh Indonesia baik milik kedinasan, universitas dan swasta untuk riset dan test COVID-19;
11. Transparansi informasi dan logistik farmasi dalam penanganan COVID-19;
12. Mendorong solidaritas internasional untuk penanganan pandemi COVID-19.
13. Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan;
14. Tanggung pendapatan pekerja formal dan informal selama COVID-19 (*universal basic income)*;
15. Jaminan tidak ada PHK, jika pekerja dirumahkan berhak mendapatkan upah secara penuh;
16. Mendesak APBN perubahan untuk pengalihan pos anggaran dari pertahanan dan infrastruktur ke kesehatan, jaminan pangan dan subsidi untuk rakyat;
17. Efektivitas penggunaan dana negara (APBN dan APBD) untuk pembiayaan kesehatan;
18. Pemotongan gaji dan tunjangan bagi pejabat negara dan komisaris-direksi BUMN;
19. Efisiensi keuangan BUMN untuk mencegah terjadinya krisis utang BUMN;
20. Bubarkan lembaga dan jabatan publik yang memboroskan dana negara;

21. *Reshuffle* tim ekonomi Jokowi karena gagal mengantisipasi krisis;
22. Stop proyek infrastruktur dan pemindahan ibukota baru;
23. Redistribusi kekayaan melalui pajak progresif orang kaya;
24. Redistribusi lahan yang dikuasai negara dan korporasi;
25. Tutup bantuan keuangan dari kreditur asing (IMF, World Bank, ADB, AIIB);
26. Renegosiasi utang luar negeri;
27. Tutup pasar saham selama masa darurat untuk mencegah pelemahan nilai tukar rupiah;
28. Tanggung beban biaya cicilan dan kredit rakyat kecil;
29. Stop kriminalisasi aktivis pro demokrasi dan penolak Omnibus Law;
30. Bebaskan biaya kuliah selama dua semester;
31. Cabut 4 RUU Omnibus Law, karena Omnibus Law tidak menjawab permasalahan disaat krisis ekonomi dan krisis COVID-19.

Narahubung: Kontra Tirano (0812-2530-7251)